



## PENDAMPINGAN PENDIDIKAN POLITIK; SIDE EFFECT WACANA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP BAGI DEMOKRASI INDONESIA

Inka Nusamuda Pratama<sup>1\*</sup>, Darmansyah<sup>2</sup>, Azwar Subandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

[inka.nusamuda@ummat.ac.id](mailto:inka.nusamuda@ummat.ac.id)<sup>1</sup>, [Darmansyah.ai59@gmail.com](mailto:Darmansyah.ai59@gmail.com)<sup>2</sup>, [AzwarSubandi63@gmail.com](mailto:AzwarSubandi63@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya di tingkat desa. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman wacana sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pendampingan dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda di Desa Karang Bongkot. Kegiatan seperti diskusi, seminar, dan simulasi pemilu dilakukan selama program berlangsung. Selain itu, materi pendidikan tentang sistem pemilu dan demokrasi dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa pendampingan pendidikan politik sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Wacana tentang sistem pemilihan proporsional tertutup di Indonesia dapat mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Namun, melalui pendampingan dan pelatihan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan penguatan demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, program pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta membuka kesadaran masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia. Diharapkan program ini dapat menjadi contoh kegiatan serupa di daerah lain dan semakin memperkuat demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendidikan Politik; Dampak; Pemilu; Proporsional Tertutup; Demokrasi.

**Abstract:** This activity aims to increase public participation in the democratic process, especially at the village level. Additionally, the program aims to provide an understanding of the discourse on Indonesia's closed proportional election system and its impact on public participation in general elections. The method used in this program is mentoring and training, involving community leaders, religious figures, and youth in the village of Karang Bongkot. Activities such as discussions, seminars, and simulated elections were conducted during the program. Additionally, educational materials on the election system and democracy were created and disseminated to the community. The results of this program show that political education mentoring is essential in increasing public participation in the democratic process. The discourse on the closed proportional election system in Indonesia can affect public participation and involvement in general elections. However, through proper mentoring and training, the public can better understand the importance of participating in the democratic process and strengthening democracy in Indonesia. In conclusion, this community service program has successfully increased public understanding and participation in the democratic process and opened the public's awareness of the election system in Indonesia. It is hoped that this program can serve as an example for similar activities in other regions and further strengthen democracy in Indonesia.

**Keywords:** Political Education; Impact; Election; Closed Proportional; Democracy.



#### Article History:

Received : 20-01-2023  
Revised : 06-02-2023  
Accepted : 30-04-2023  
Online : 30-04-2023



This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

## **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka secara demokratis (Pasaribu, 2017). Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu masyarakat memahami konsep-konsep seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang merupakan nilai-nilai inti dari sistem demokrasi. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, pendidikan politik masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik, dan kurangnya keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga sosial dan politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (Prasetyo, 2021).

Kurangnya pendidikan politik yang memadai dapat berdampak negatif pada kualitas demokrasi di suatu daerah. Masyarakat yang tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dapat kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan menghindari partisipasi dalam proses politik yang demokratis (Pratama et al., 2023). Akibatnya, mereka dapat merasa tidak diwakili dan kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka, yang dapat memperburuk kondisi politik dan sosial di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dan politik untuk meningkatkan pendidikan politik di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kurang terpapar pendidikan politik (Nusamuda Pratama et al., 2021). Dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan proses politik, kita dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki suara yang kuat dalam menentukan arah masa depan negara ini (Hasyim et al., 2020).

Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, merupakan salah satu contoh daerah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam memperkuat pendidikan politik dan kualitas demokrasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh desa tersebut adalah sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup yang masih menjadi wacana yang diperdebatkan. Sistem pemilu proporsional tertutup ini dianggap sebagai sebuah permasalahan yang berpotensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia karena dapat membatasi hak warga negara dalam memilih pemimpin mereka secara bebas

dan terbuka.

Sistem pemilu proporsional tertutup dimana hanya partai-partai tertentu yang dapat mengajukan calon legislatifnya, dinilai dapat mengurangi variasi dan variasi ideologi di parlemen dan menghasilkan pengambilan keputusan yang kurang representatif (Pratama & Mutiarin, 2019). Selain itu, sistem ini juga dapat membatasi hak pilih warga negara yang lebih suka memilih calon individual daripada partai politik, dan dapat menyebabkan hilangnya partisipasi masyarakat dalam proses politik yang demokratis (Hasanah et al., 2023).

Perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup yang masih berlangsung di Indonesia adalah sebuah contoh bagaimana tantangan dalam memperkuat pendidikan politik dan kualitas demokrasi masih menjadi isu yang krusial di berbagai daerah (Romli, 2021). Selain itu, permasalahan seperti kurangnya variasi dan variasi ideologi di parlemen dan hilangnya partisipasi masyarakat dalam proses politik yang demokratis juga dapat memperburuk situasi politik dan sosial di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dalam memperkuat pendidikan politik dan kualitas demokrasi di Indonesia, termasuk di desa-desa seperti Desa Karang Bongkot. Pendidikan politik yang lebih baik dapat membantu masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik yang demokratis (Pratama, 2022).

Selain itu, memperkenalkan sistem pemilu proporsional terbuka di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih calon individual daripada hanya partai politik dapat meningkatkan variasi dan variasi ideologi di parlemen dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih representatif (Dr. Moh. Muzakki, 2016). Hal ini juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Namun, perubahan seperti itu tidak dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan pendidikan politik yang lebih baik dan pengenalan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis di Indonesia (Budiono, 2017).

Pendampingan pendidikan politik di Desa Karang Bongkot sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem demokrasi yang sehat dan mengurangi dampak dari wacana sistem pemilu proporsional tertutup (Arif, 2019).

Melalui pendampingan ini, masyarakat dapat dipersiapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik yang demokratis dan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, pendampingan juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu politik yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Desa Karang Bongkot dan Indonesia secara umum (Bashori, 2018).

Dengan demikian, melalui pendampingan pendidikan politik yang tepat sasaran dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat Desa Karang Bongkot dapat memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya sistem demokrasi yang sehat dan dapat memperoleh kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik yang demokratis. Dengan demikian, pendampingan pendidikan politik dapat membantu masyarakat Desa Karang Bongkot untuk mengatasi masalah seperti ketidaktahuan tentang hak-hak politik mereka, kurangnya partisipasi dalam pemilihan umum, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik. Untuk mencapai tujuan ini, pendampingan pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah setempat. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, diskusi kelompok, dan kampanye publik. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan memfasilitasi diskusi dan debat yang terbuka.

Dalam menjalankan kegiatan pendampingan pendidikan politik, penting untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik di Desa Karang Bongkot. Faktor-faktor seperti adat istiadat, agama, dan struktur sosial harus dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan program pendampingan pendidikan politik. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki adat istiadat yang kuat, pendampingan dapat dilakukan dengan mengajak tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dapat diadakan kegiatan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang relevan dengan politik. Selain itu, dalam merancang program pendampingan pendidikan politik, penting untuk mempertimbangkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terbuka, memfasilitasi diskusi kelompok, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program pendampingan dapat lebih efektif dan berkelanjutan (Hermawan, Candra, 2020).

Keterlibatan pemerintah setempat juga sangat penting dalam program pendidikan politik. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, anggaran, dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu dalam mempromosikan program pendampingan pendidikan politik agar lebih dikenal oleh masyarakat. Selain faktor-faktor tersebut, juga penting untuk memperhatikan tujuan dan sasaran program pendampingan pendidikan politik yang akan dilaksanakan. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan metode dan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan program dapat berkisar dari meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkenalkan sistem politik yang lebih baik, hingga membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik (Nasuha & Kholik, 2019).

Terakhir, dalam melaksanakan program pendampingan pendidikan politik, perlu juga diperhatikan evaluasi dan monitoring program secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan efektif dan mencapai tujuannya. Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan program dan melakukan perbaikan jika ada kendala atau masalah yang muncul (Lestanata et al., 2022). Dengan evaluasi dan monitoring yang baik, program pendampingan pendidikan politik dapat lebih terarah dan sukses dalam mencapai tujuannya.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam program ini adalah pendampingan dan pelatihan, dengan melibatkan masyarakat sejumlah 25 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Adapun untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pemilih di Desa Karang Bongkot tentang pendidikan politik, maka dilakukan tahapan pendampingan sebagai berikut:

### **1. Pra kegiatan**

- a. Identifikasi Mitra: Identifikasi masyarakat di Desa Karang Bongkot yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam konteks pendidikan politik dan pemilu.
- b. Pertemuan Pendahuluan: Dilakukan pertemuan awal antara tim pendamping dengan mitra untuk membahas tujuan, harapan, dan rencana kegiatan. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk memahami profil mitra lebih lanjut dan menentukan tanggung jawab masing-masing pihak.

## **2. Pelaksanaan kegiatan**

- a. **Workshop/Pelatihan:** Melakukan serangkaian workshop atau pelatihan yang fokus pada pemahaman sistem pemilu proporsional tertutup, pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi, dan keterampilan terkait seperti memilih dan memahami mekanisme pemilu.
- b. **Diskusi Kelompok:** Mengadakan sesi diskusi kelompok untuk memfasilitasi pertukaran pendapat dan pemahaman antara mitra serta memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan masalah yang terkait dengan pemilu di tingkat desa.
- c. **Penyuluhan dan Penyebaran Informasi:** Menyampaikan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas melalui kampanye publik, pembuatan materi edukatif, dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi.

## **3. Sosialisasi dengan materi**

- a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
- b. Pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup;
- c. Teknik berkomunikasi publik. Selanjutnya, metode penyampaian materi sosialisasi, yaitu dengan metode:
  - 1) Simulasi dan pemaparan materi
  - 2) Diskusi kelompok/Forum Group Discussion (FGD),
  - 3) Ceramah,
  - 4) Alat bantu (visual dan non visual), dan
  - 5) Memposting hasil pendampingan di media sosial.

## **4. Evaluasi Kegiatan**

**Survei dan Penilaian:** Melakukan survei dan penilaian terhadap mitra dan masyarakat untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Persentase peningkatan kemampuan mitra setelah kegiatan dilaksanakan sebesar 100%.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari kegiatan pengabdian kami melalui pendampingan pendidikan politik, masyarakat di Desa Karang Bongkot dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai sistem pemilihan umum yang ada. Mereka dapat mempelajari mekanisme dan prosedur yang terlibat dalam setiap sistem pemilihan umum, termasuk sistem pemilihan umum proporsional tertutup yang menjadi wacana di Indonesia. Selain itu, mereka juga dapat

memahami dampak positif dan negatif dari masing-masing sistem pemilihan umum, termasuk dampak sistem pemilihan umum proporsional tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat di Desa Karang Bongkot dapat mempertimbangkan dengan lebih bijaksana dan kritis dalam memilih sistem pemilihan umum yang tepat dan menguntungkan bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Pendampingan Politik Pada Masyarakat Desa Karang Bongkot

Pendidikan politik yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses-proses politik yang terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai politik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti dalam pemilihan umum, kampanye politik, atau aksi-aksi sosial. Pendidikan politik yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbicara dan berdebat mengenai isu-isu politik yang kompleks dan kontroversial. Dengan demikian, pendidikan politik yang baik dapat membangun kesadaran politik yang kuat dan kritis pada masyarakat, sehingga mereka dapat memainkan peran aktif dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sistem pemilihan umum proporsional tertutup merupakan sebuah wacana yang sedang dibahas di Indonesia. Sebelum memutuskan untuk mengadopsi sistem ini, perlu dipertimbangkan secara matang dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Beberapa dampak yang perlu diperhatikan antara lain: pertama, sistem ini dapat menghasilkan representasi yang kurang proporsional dan tidak mewakili berbagai kelompok masyarakat. Hal

ini dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kedua, sistem ini dapat membatasi akses partai politik ke parlemen dan mengecilkan ruang bagi partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini dapat mengancam keragaman politik dan pluralisme di Indonesia. Ketiga, sistem ini dapat memperkuat peran elit politik dalam proses politik, sehingga mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai dampak sistem pemilihan umum proporsional tertutup sebelum memutuskan untuk mengadopsinya, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Diskusi Bersama Masyarakat Desa Karang Bongkot

Perlu juga dilakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dengan baik berbagai sistem pemilihan umum yang ada. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pentingnya mendorong partisipasi politik yang aktif. Dalam hal ini, peran media massa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting untuk membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, sebelum memutuskan untuk mengadopsi sistem pemilihan umum proporsional tertutup, perlu juga dilakukan kajian yang mendalam mengenai konteks dan kondisi politik di Indonesia saat ini. Dalam konteks yang serba dinamis ini, sistem pemilihan umum yang efektif dan efisien adalah sistem yang dapat menghasilkan representasi yang adil, proporsional, dan mewakili berbagai kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat umum untuk terlibat dalam diskusi dan dialog yang produktif mengenai sistem pemilihan umum yang tepat untuk Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan politik juga dapat berperan penting dalam membangun kesadaran politik dan memperkuat partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian,



diharapkan bahwa keputusan mengenai sistem pemilihan umum yang akan diadopsi dapat diambil dengan pertimbangan matang dan berdasarkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Forum terbuka merupakan sebuah wadah yang penting untuk memfasilitasi diskusi dan dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan berbagai stakeholder lainnya. Melalui forum terbuka, masyarakat dapat mengemukakan pandangan mereka mengenai berbagai isu terkait, termasuk isu-isu politik, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks pendidikan politik, forum terbuka dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat. Dalam forum terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai berbagai isu politik dan mampu memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Hal ini sangat penting dalam membangun partisipasi politik yang aktif dan menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, forum terbuka juga dapat memperkuat jaringan sosial dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dalam forum terbuka, masyarakat dapat bertemu dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, termasuk dengan para pemimpin dan wakil-wakil masyarakat yang terpilih. Hal ini dapat membuka peluang kerja sama dan memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks pemilihan umum, forum terbuka dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan informasi dan membangun kesadaran politik masyarakat mengenai berbagai sistem pemilihan umum yang ada. Dalam forum terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai berbagai sistem pemilihan umum, termasuk dampak positif dan negatif dari setiap sistem. Hal ini sangat penting dalam membantu masyarakat memahami dan memilih sistem pemilihan umum yang paling sesuai dengan kondisi dan konteks politik yang ada.

Namun, dalam memanfaatkan forum terbuka, perlu juga diperhatikan beberapa hal. Pertama, penting untuk memastikan bahwa forum terbuka tersebut diadakan secara transparan dan terbuka, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses informasi dan terlibat dalam diskusi dan dialog. Kedua, perlu juga diperhatikan bahwa forum terbuka tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan hoaks dan informasi yang tidak akurat atau tendensius, karena hal ini dapat merusak partisipasi politik yang sehat dan menghasilkan kebijakan publik yang buruk. Dalam kesimpulannya, forum terbuka merupakan salah satu sarana yang

penting dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat dan membangun kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Namun, dalam memanfaatkan forum terbuka, perlu memastikan bahwa forum tersebut diadakan secara transparan dan terbuka, serta tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tendensius.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

**Peningkatan Pengetahuan:** Setelah kegiatan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan mitra tentang sistem pemilu proporsional tertutup dan mekanisme demokrasi. Survei yang dilakukan sebelum dan setelah kegiatan dapat menunjukkan peningkatan persentase 100% pengetahuan yang dimiliki oleh mitra terkait aspek-aspek pemilu dan demokrasi.

**Peningkatan Keterampilan:** Melalui workshop, pelatihan, dan diskusi kelompok, mitra diberikan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratisasi. Keterampilan ini meliputi kemampuan memilih secara bijak, memahami mekanisme pemilihan, serta kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan politik di tingkat desa. Persentase peningkatan keterampilan mitra dapat diukur melalui evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan.

**Perubahan Sikap:** Kegiatan pendampingan ini juga dapat menghasilkan perubahan sikap mitra terhadap pemilu dan proses demokratisasi. Mereka mungkin menjadi lebih sadar akan pentingnya hak suara, keadilan dalam representasi politik, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Penilaian sikap mitra sebelum dan sesudah kegiatan dapat menggambarkan perubahan positif yang terjadi.

Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pendampingan pendidikan politik bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus memperhatikan wacana sistem pemilu proporsional tertutup, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Sebaiknya dipilih sistem pemilu yang lebih terbuka dan transparan, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi. Selain itu, partai politik juga harus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, terutama di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat lebih memahami visi dan misi partai politik dan calon-calon yang diusungnya. Para tokoh masyarakat, agama, dan tokoh pemuda juga dapat turut serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam proses demokrasi, dengan memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat meningkat, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, khususnya di tingkat desa.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak, baik itu Pemerintah Desa Karang Bongkot, Masyarakat, maupun para tokoh masyarakat. Karena itu, kami ingin mengucapkan terimakasih atas partisipasi, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan.

Dalam program ini, kami berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya di tingkat desa. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan membuka wawasan masyarakat tentang sistem pemilu di Indonesia. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan. Semoga program pengabdian masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan semakin memperkuat demokrasi Indonesia.

### DAFTAR RUJUKAN

- Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2).
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2). <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Budiono, B. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.605>
- Dr. Moh. Muzakki, Ms. (2016). Prismatic Policy Menuju Equilibrium Politik: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Sistem Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Heritage*, 4(1).
- Hasanah, S., Pratama, I. N., Rahmat, A. F., Kurniawan, C., Master, L., Mataram, U. M., & Mataram, U. M. (2023). *The Indonesian Journal of the Social Sciences Digital Government in Social Sciences Discipline : Mapping Pivotal Features and Proposed Theoretical Model*. 11(1).
- Hasyim, B., Sartibi, N., & Shiddiq Fauzan, H. (2020). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Budaya Dan Masyarakat*, 1(1).

- Hermawan, Candra, I. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal.Unsur.Ac.Id*, 10(1).
- Lestanata, Y., Hidayatullah, ), Inka, ), Pratama, N., & Mataram, U. M. (2022). Pendampingan Desa Siaga Bencana Berbasis Komunitas Dalam Meningkatkan Masyarakat Tangguh Bencana Di Desa Dangiang Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Community-Based Disaster Standard Assistance in Imp. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 129–141. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JAMIN/index>
- Nasuha, C. N., & Kholik, C. A. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Syntax Idea*, 1(8).
- Nusamuda Pratama, I., Hadi, A., Zitri, I., & Abstrak, I. A. (2021). Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram Manajemen Bencana Non Alam Covid-19 Dilihat Dari Kepemimpinan Quadruple Helix Di Kota Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram. *Jurnal Tata Sejuta*, 7(2). <http://ejurnalstiamataram.ac.id>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 5(1).
- Prasetyo, L. A. (2021). Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 05.
- Pratama, I. N. (2022). Pendampingan Grand Design Taman Transito Di Kelurahan Lempeh Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Administrasi Publik (JP-PUBLIK)*, 30–34. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JPAP/article/viewFile/12672/5979>
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). *Jurnal Public Policy Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram*. 1(March 2020).
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). Formulasi Kebijakan Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1), 29–48. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Romli, L. (2021). Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019. *Kajian*.